

## ABSTRAK

Lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian suatu negara, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inovasi dalam industri keuangan adalah *Financial Technology (Fintech)*, khususnya layanan *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Namun, penerapan Perjanjian baku dalam kontrak elektronik (*e-contract*) pada *platform P2P Lending* menimbulkan permasalahan hukum terkait keseimbangan hubungan antara kreditor dan debitor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekesuaian asas-asas hukum perjanjian dalam kontrak elektronik (*e-contract*) yang diimplementasikan oleh PT Pohon Dana Indonesia dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta mengidentifikasi akibat hukum dari penggunaan perjanjian baku dalam layanan *P2P Lending*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian meunjukkan bahwa penerapan perjanjian baku dalam kontrak elektronik (*e-contract*) pada *platform P2P Lending* PT Pohon Dana Indonesia berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum. Isinya lebih menguntungkan pihak yang membuat (pihak yang dominan) dan merugikan bagi pihak yang menerima perjanjian (debitor). Hal ini tampak dari adanya klausul pengalihan tanggung jawab, yang bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a POJK No. 77/POJK.01/2016 serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akibat hukumnya, perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa penerapan perjanjian baku dalam *P2P Lending* tidak merugikan salah satu pihak dan tetap menjamin keseimbangan hubungan hukum antara kreditor dan debitor.

**Kata Kunci :** *Peer to Peer Lending*, Perjanjian Baku, Kontrak Elektronik, Keseimbangan.

## **ABSTRACT**

*Financial institutions play a strategic role in a country's economic system, particularly in maintaining economic stability and improving public welfare. One of the innovations in the financial industry is Financial Technology (Fintech), specifically Peer-to-Peer Lending (P2P Lending), which facilitates access to financing for communities that are not yet covered by conventional banking services. However, the implementation of standard agreements in electronic Contracts (e-contracts) on P2P Lending platforms raises legal issues concerning the balance of relationships between creditors and debtors.*

*This study aims to analyze the conformity of Contract law principles in electronic Contracts implemented by PT Pohon Dana Indonesia with the prevailing legal provisions in Indonesia, as well as to identify the legal consequences of using standard agreements in P2P Lending services. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used consists of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*The study results indicate that the use of standard agreements in electronic Contracts on the P2P Lending platform of PT Pohon Dana Indonesia has the potential to create an imbalance in legal relationships. The Contract content tends to favor the drafting party (the dominant party) while disadvantaging the party accepting the agreement (the debtor). This is evident from the inclusion of liability transfer clauses, which contradict Article 22 paragraph (1) letter a of POJK No. 77/POJK.01/2016 and Article 18 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. As a legal consequence, agreements containing clauses that contradict legal provisions may be declared null and void, rendering them unenforceable for the parties involved. Therefore, stricter regulations and more effective supervision mechanisms are necessary to ensure that the application of standard agreements in P2P Lending does not harm any party and maintains a balanced legal relationship between creditors and debtors.*

**Keywords:** *Peer to Peer Lending, Standard Agreement, Electronic Contract, Balance.*